



GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 10 Februari 2025
11 Syakban 1446 H

Nomor : 050/28 /BAP/II-2025
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Pelaksanaan Simbangda Berbasis
Pembuktian (Simbangda *Based Evidence*)
Tahun 2025.

Yth. Daftar Terlampir
di
Padang

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Biro Administrasi Pembangunan menerapkan aplikasi Simbangda berbasis pembuktian atau Simbangda *Based Evidence* (SBE) guna pengendalian administrasi pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD.

Aplikasi SBE yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak Tahun 2018 sudah dilakukan *upgrade* beberapa kali, dan pada tahun 2024 telah dilakukan integrasi dengan aplikasi yang dikembangkan oleh OPD-OPD lain dalam rangka meningkatkan kinerja pelaporan pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Agar sistem ini bisa berjalan dengan baik dan dapat di gunakan oleh setiap OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada OPD agar menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk diinput pada Aplikasi SBE berupa pagu anggaran, paket-paket pekerjaan, volume paket, menetapkan target fisik dan keuangan pada setiap sub kegiatan dan menyerahkan semua dokumennya kepada operator Aplikasi SBE sehingga seluruh data base sudah diinput oleh operator ke aplikasi SBE.
2. KPA/PPTK bertanggung jawab penuh terhadap penyiapan dan keabsahan dokumen (*evidence*) yang diinputkan oleh operator ke aplikasi SBE dan Biro Administrasi Pembangunan akan melakukan evaluasi berkala dan rekonsiliasi data guna memastikan keakuratan data dan pemaketan yang dilakukan oleh OPD dimana Indikator penilaian capaian bobot fisik pekerjaan/sub kegiatan pada laporan realisasi fisik dan keuangan di ukur melalui dokumen tersebut.
3. Adapun dokumen pembuktian (*evidence*) yang harus disiapkan oleh KPA/PPTK dalam setiap tahapan pekerjaan/sub kegiatan dan dokumen *evidence* untuk BLUD sebagaimana terdapat pada lampiran II dan III.
4. Tahapan unggah dokumen *evidence* pengendalian administrasi pembangunan terdiri dari:
 - a. Dokumen perencanaan, dengan batas waktu Januari s.d Maret, seperti: Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Umum Pengadaan (RUP), Rapat Persiapan Awai (RPA), SK Tim, Nota Kesepahaman/Kerjasama, Proses Pengadaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Kontrak.

- b. Dokumen Pelaksanaan yang diunggah sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
 - c. Dokumen Pelaporan, seperti: Laporan Kegiatan/Sub Kegiatan/Paket Pekerjaan dan Dokumen Berita Acara Serah Terima (PHO/FHO) yang diunggah setelah pekerjaan selesai.
5. OPD yang melaksanakan paket pekerjaan melalui Penyedia, wajib mengisi data-data kontrak pada fitur Dokumen Kontrak pada Aplikasi SBE.
 6. Target Fisik dan Keuangan disesuaikan dengan Rencana Aliran Kas (RAK) dan jadwal pelaksanaan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen KAK yang sudah diinput pada Aplikasi SBE, tidak dapat diubah sampai adanya kebijakan pergeseran/perubahan APBD.
 7. KPA/PPTK segera menyampaikan *evidence* pelaksanaan kegiatan beserta realisasi keuangan kepada operator Aplikasi SBE setiap selesai kegiatan dan operator segera mengunggah ke Aplikasi SBE.
 8. Helpdesk pada Biro Administrasi Pembangunan melakukan validasi terhadap *evidence-evidence* yang diunggah pada Aplikasi SBE setiap hari kerja.
 9. Dalam rangka penyiapan data dan bahan rapat pimpinan (rapat evaluasi lingkup asisten dan rapat staf dengan Gubernur), Aplikasi Simbangda akan ditutup pada pukul 17:00 WIB dihari kerja terakhir setiap bulan dan dibuka kembali pada pukul 09:00 WIB pada hari kerja berikutnya.
 10. Kepala OPD dapat diberikan hak akses Aplikasi SBE dalam rangka pengendalian dan evaluasi internal OPD terhadap realisasi fisik dan keuangan, sekaligus memonitor kepatuhan KPA/PPTK dalam memberikan *evidence* pada setiap tahap pekerjaan/sub kegiatan kepada operator Aplikasi SBE.
- Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Lampiran I

Nomor : 050/ 28 /BAP/II-2025
Sifat : Penting
Hal : Pelaksanaan Simbangda Berbasis Pembuktian (Simbangda Based Evidence)
Tahun 2025

Kepada Yth :

1. Sekretaris DPRD
2. Inspektur Daerah
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
9. Kepala Badan Kesatuan Bangpol
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Kepala Badan Penghubung
12. Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
13. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Kepala Dinas Pangan
18. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
19. Kepala Dinas Kelautan Perikanan
20. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
21. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
22. Kepala Dinas Kehutanan
23. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
24. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
27. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
28. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
29. Kepala Dinas Kebudayaan
30. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31. Kepala Dinas Pendidikan
32. Kepala Dinas Kesehatan
33. Kepala Dinas Pemuda Dan Olah Raga
34. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
35. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
36. Kepala Dinas Perhubungan
37. Kepala Dinas Sosial
38. Kepala Dinas Pariwisata
39. Kepala Biro Hukum
40. Kepala Biro Administrasi Pimpinan
41. Kepala Biro Pemerintahan
42. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
43. Kepala Biro Perekonomian
44. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
45. Kepala Biro Organisasi
46. Kepala Biro Umum
47. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
48. Kepala RSUD M. Natsir Solok
49. Kepala RSUD Pariaman
50. Kepala RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi
51. Kepala Rumah Sakit Jiwa Prof. Hb. Sa'Anin

Lampiran II

Nomor : 050/ 28 /BAP/II-2025
 Sifat : Penting
 Hal : Pelaksanaan Simbangda Berbasis Pembuktian (Simbangda Based Evidence) Tahun 2025

**DOKUMEN EVIDENCE PADA SIMBANGDA BASED EVIDENCE (SBE) TAHUN 2025
 (SELAIN BLUD)**

No	DOKUMEN	EVIDENCE	BOBOT
A. MELALUI SWAKELOLA			
1.	KAK	Seluruh halaman dokumen KAK yang telah ditandatangani oleh KPA	5 %
2.	RUP	a. Nama paket pekerjaan disesuaikan dengan yang tercantum dalam RUP b. Nama paket dapat disesuaikan dengan nama Sub kegiatan, apabila tidak sesuai dengan nama di RUP c. Dokumen yang di unggah, screenshot RUP yang ada mencantumkan nama Sub kegiatan/paket pekerjaan yang bersangkutan	5 %
3.	Rapat Perencanaan Awai (RPA)	a. Nota Dinas/Undangan Rapat b. Notulen rapat c. Daftar hadir rapat	5 %
4.	SK Tim (Swakelola Type I)	SK Tim tentang susunan pelaksana Sub kegiatan/Paket Pekerjaan, yang ditandatangani oleh Kepala OPD/Sekda/Gubernur.	5 %
5.	Nota Kesepahaman/ Nota Kerjasama (Swakelola Type II)	Naskah Kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak	
6.	Pelaksanaan A. Type I (Instansi sendiri) <ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Non Urusan (rutin) bersifat pembayaran • Sub kegiatan Non Urusan (rutin) dengan output Laporan/Dokumen • Sub Kegiatan Urusan B. Type II (Instansi Pemerintah Lain) C. Type III & IV (Ormas dan LSM)	Kwitansi Pembayaran. Dokumen/Screenshot Laporan fungsional bendahara. a. Undangan b. Daftar hadir c. Dokumentasi pelaksanaan d. Khusus swakelola pekerjaan kontruksi, evidence laporan berupa paket pekerjaan yang dilaksanakan (Laporan realisasi dan dokumentasi)	75 %

7.	Laporan	Laporan pelaksanaan paket pekerjaan/sub kegiatan yang ditanda tangani oleh KPA Khusus swakelola pekerjaan konstruksi, laporan berupa Berita Acara Serah terima (PHO)	5 %
----	---------	--	-----

No	DOKUMEN	EVIDENCE	BOBOT
B. MELALUI PENYEDIA			
1	RUP	Sama dengan pelaksanaan pekerjaan swakelola (diambil dari screenshot dari aplikasi SiRUP halaman depan, halaman RUP dan halaman KPA)	5 %
2	HPS	<p>Pagu Dana < 10 Juta</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak diharuskan HPS, dokumen yang diunggah berupa Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan Paket Pekerjaan oleh KPA yang mencantumkan Harga Barang/Produk. <p>Pagu dana > 10 juta</p> <ul style="list-style-type: none"> Rincian HPS dalam bentuk tabel yang menggambarkan rincian harga dan ditandatangani oleh KPA. <p>Pekerjaan yang dilaksanakan oleh UKPBJ</p> <ul style="list-style-type: none"> Screenshot nilai total HPS yang berada pada aplikasi SPSE <p>Pekerjaan yang dilaksanakan dengan e-purchasing</p> <ul style="list-style-type: none"> Screenshot proses e-purchasing yang menampilkan harga pada aplikasi SPSE 	5 %
3	Proses Pengadaan	<p>Pagu Dana < 50 Juta</p> <ul style="list-style-type: none"> Nota Dinas Persetujuan Pelaksanaan Paket Pekerjaan oleh KPA yang mencantumkan Harga Barang/Produk <p>Pagu dana > 50 juta</p> <ul style="list-style-type: none"> Screenshot jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE atau yang dibuat oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa <p>Pekerjaan yang dilaksanakan dengan e-purchasing</p> <ul style="list-style-type: none"> Screenshot proses e-purchasing 	
4	Kontrak	<p>Pekerjaan Kontruksi s.d 200 Juta</p> <ul style="list-style-type: none"> SPK seluruh halaman (sampai yang ada tanda tangan) <p>Pekerjaan Konsultansi s.d 100 Juta</p> <ul style="list-style-type: none"> SPK seluruh halaman (sampai yang ada tanda tangan) <p>Pengadaan Barang/ jasa lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> Pagu dana 10 s.d 50 Juta berupa Kwitansi perjanjian Pagu dana > 50 Juta s.d 200 Juta berupa Surat Perintah Kerja (SPK) <p>Pengadaan oleh UKPBJ</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Perjanjian sampai halaman yang bertanda tangan <p>e-Purchasing</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Pesanan 	10 %
5	Pelaksanaan	<p>a. Pengadaan barang/jasa lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> Berita Acara Pemeriksaan Barang 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Foto dokumentasi b. Jasa Konsultasi <ul style="list-style-type: none"> • Laporan pendahuluan • Laporan Antara • Laporan akhir c. Jasa konsultasi pengawas pekerjaan konstruksi <ul style="list-style-type: none"> • Laporan bulanan dari pengawas d. Pekerjaan Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> • Laporan bulanan yang telah disetujui oleh konsultan pengawas. 	70 %
6	Serah Terima Pekerjaan	Berita Acara Serah Terima Antara KPA dengan penyedia barang/jasa.	5 %

Lampiran III

Nomor : 050/ z 8 /BAP/II-2024

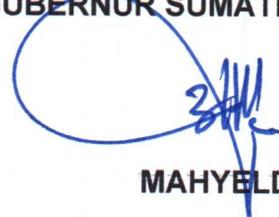
Sifat : Penting

Hal : Pelaksanaan Simbangda Berbasis Pembuktian (Simbangda Based Evidence)
Tahun 2024**DOKUMEN UNGGAH EVIDENCE SIMBANGDA PADA BLUD TAHUN 2025**

No	DOKUMEN	EVIDENCE	BOBOT
A. MELALUI SWAKELOLA			
1.	KAK	Seluruh halaman dokumen KAK yang telah ditandatangani oleh KPA	5 %
2.	RUP	a. Nama paket pekerjaan disesuaikan dengan yang tercantum dalam RUP b. Nama paket dapat disesuaikan dengan nama Sub kegiatan, apabila tidak sesuai dengan nama di RUP c. Dokumen yang di unggah, screenshot RUP yang ada mencantumkan nama Sub kegiatan/paket pekerjaan yang bersangkutan	5 %
3.	Rapat Perencanaan Awal (RPA)	a. Nota Dinas/Undangan Rapat b. Notulen rapat c. Daftar hadir rapat	5 %
4.	SK Tim	SK Tim tentang susunan pelaksana Sub kegiatan/Paket Pekerjaan, yang ditandatangani oleh Kepala OPD/Sekda/Gubernur	5 %
5.	Pelaksanaan	Laporan Realisasi bulanan (sebanyak 12 bulan)	75 %
6.	Laporan	Laporan akhir tahun PPTK	5 %
B. MELALUI PENYEDIA			
1.	RUP	Sama dengan pelaksanaan pekerjaan swakelola (diambil dari screen shoot dari aplikasi SIRUP halaman depan, halaman RUP dan halaman KPA)	5 %
2	HPS	Pagu dana > 10 juta Rincian HPS dalam bentuk tabel yang ditandatangani oleh KPA	5 %
3	Proses Pengadaan	a. Screen shoot jadwal pengadaan dalam aplikasi SPSE b. Dokumen Pesanan dari pejabat pengadaan - Undangan penawaran - Permintaan negosiasi	5 %
4	Kontrak	a. Anggaran 50 s.d 1,5 M Dokumen SPK	10 %

		b. Anggaran > 1,5 M Dokumen Kontrak c. e-Purchasing Surat Pesanan	
5	Pelaksanaan	a. Pengadaan barang/jasa lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Berita Acara Pemeriksaan Barang • Foto dokumentasi b. Jasa Konsultansi <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pendahuluan • Laporan Antara • Laporan Akhir c. Jasa konsultansi pengawas pekerjaan konstruksi <ul style="list-style-type: none"> • Laporan bulanan dari pengawas d. Pekerjaan Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> • Laporan bulanan yang telah disetujui oleh konsultan pengawas. 	70 %
6	Serah Terima Pekerjaan	Berita Acara Serah Terima Antara KPA dengan Rekanan	5 %

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI